Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 7 No 1 : 59-68, 2020
e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2020.007.1.8

DAYA DUKUNG PANGAN DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Food Carrying Capacity in Supporting Food Availability of South Sumatera Province

Sabrina Sabila*
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kapten A. Rivai No. 23 Palembang
*Penulis korespondensi: sabrina_bila@yahoo.com

Abstract

South Sumatra Province has the potential of agricultural land, especially rice food, so it is necessary to manage agricultural land optimally to support the availability in meeting food needs. This research was focused on the carrying capacity of food that aimed to determine the carrying capacity of land/food based on supply and demand of land/food so that it can be known that the carrying capacity of regional food is sufficient or not in meeting food needs. This research method used a quantitative descriptive. The results showed the South Sumatra Province's food carrying capacity based on the incoming category/surplus category with a value of 3.32 or 2,167,003.04 tons of rice, but still included in the budget and deficit areas, would be adjusted to those that entered a large surplus. While the regions that indicated the lowest deficit level at the score limit of 0.93-1.89 were five regencies/cities, while the deficit at the score limit was 0.08-0.95 as many as four regencies/cities. Regions that are indicated deficit become the main priority to be supported by regions indicated by large surpluses.

***Keywords**: carrying capacity, food, land*

Pendahuluan

Lahan dapat diartikan tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah atau diusahakan yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonomi bagi masyarakat (Kamus Tata Ruang, 1997). Fungsi lahan sangat erat hubungannya dengan ruang, di mana apabila dikaitkan dengan pemanfaatan maupun pengaturannya, maka ruang disebut kawasan yang memiliki batas fungsi (Deliyanto, 2014). Secara fungsional, kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, kawasan yang menjadi perhatian adalah kawasan budidaya yakni kawasan pertanian terutama yang berkaitan dengan pangan. Hal ini mengingat pangan menjadi salah satu komoditas utama penunjang hidup manusia. Hal yang sama pula dinyatakan oleh Karsin (2004) bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Untuk pemenuhan akan ketersediaan pangan terutama beras perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Food and Agriculture Organization (1996) bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi (Widodo *et al.,* 2015).

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan penurunan luas lahan pertanian untuk pangan terutama beras adalah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 yang bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terjadi penurunan sawah irigasi dibandingkan data tutupan lahan tahun 2014, yakni dari 302.562 ha berkurang menjadi 286.353 ha untuk sawah irigasi, sedangkan untuk sawah tadah hujan mengalami pernambahan luasan dari 29.320 bertambah menjadi 136.472 ha. Akan tetapi, apabila dibandingkan tutupan lahan tahun 2010, maka sawah irigasi mengalami penambahan luasan, yakni dari 285.180 bertambah menjadi 286.353 ha, sedangkan untuk sawah tadah hujan terus mengalami peningkatan luasan, yakni dari 25.024 ha bertambah menjadi 136.472 ha.

Selain itu, menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, lahan pertanian di Sumatera Selataan masih belum diolah secara maksimal untuk mencapai swasembada pangan atau surplus pangan sehingga secara nasional tidak kekurangan pangan (Aminah, 2018). Dengan adanya potensi lahan pertanian yang luas, namun belum diolah maksimal, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian melakukan program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di Provinsi Sumatera Selatan yang tepatnya berlokasi di Kabupaten Banyuasin seluas kurang lebih 200.000 ha (Febrinastri, 2019). Apabila upaya ini dilakukan, maka Sumatera Selatan akan menjadi Lumbung Pangan Nasional pada tahun 2021 (Antara, 2019).

Berkaitan dengan potensi dan permasalahan, serta upaya ketersediaan dan kebutuhan pangan di atas, maka perlu diketahui daya dukung lingkungan hidup (DDLH). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan dikatakan bahwa DDLH diperlukan dalam mengetahui kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Ditambahkan pula pada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 bahwa dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pembangunan generasi saat ini maupun generasi di masa yang akan datang sehingga terciptanya keberlanjutan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Widodo *et al*. (2015) bahwa daya dukung lingkungan adalah perbandingan antara *supply* (ketersediaan) dan *demand* (kebutuhan). Selain itu, didukung pula oleh pernyataan Muta'ali (2012) bahwa dalam pengembangan wilayah, pendekatan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada daya dukung pangan yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan/pangan berdasarkan perbandingan *supply* (ketersediaan) dan *demand* (kebutuhan) lahan/pangan sehingga dapat diketahui daya dukung lahan/pangan dalam keadaan mencukupi atau tidak dalam memenuhi kebutuhan lahan/pangan. Keutamaan dalam penelitian ini menghitung daya dukung lahan/pangan selain sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, namun juga menggunakan metode kuartil dalam hal penentuan batasan/kategori daya dukung pangan/lahan.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 91.592,43 km^2 atau 9.159.243 Ha (sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017) yang terdiri atas 13 Kabupaten dan 4 Kota dengan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi. Batas administrastif Provinsi Sumatera Selatan, yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

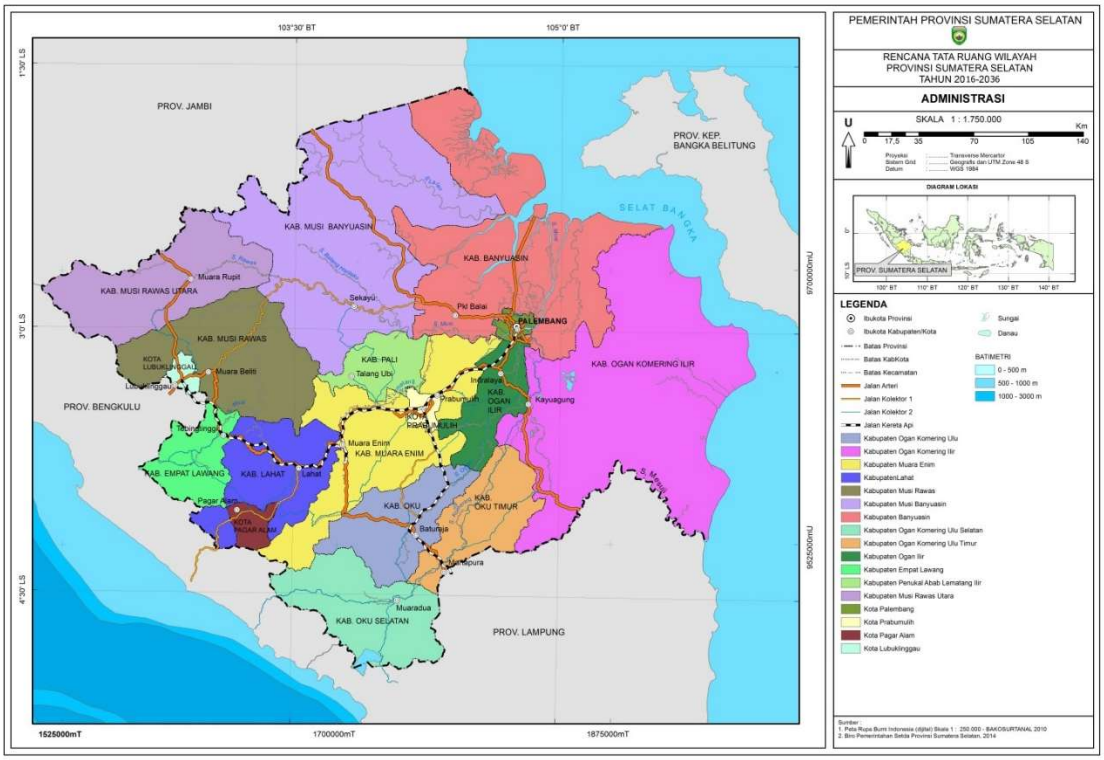

Gambar 1. Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan (Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitiatif berdasarkan data bersifat kuantatif atau angka statistik dari variabel-variabel daya dukung pangan, meliputi produksi beras dan konsumsi beras. Penentuan variabel-variabel daya dukung pangan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, di mana perhitungan tersebut dilakukan dengan pendekatan produksi beras dari sisi ketersediaan *(supply)* lahan dan konsumsi beras dari sisi kebutuhan *(demand)* lahan.

Produksi beras dengan satuan ton dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan *(supply)* pangan/lahan didapat dari perhitungan produksi padi (ton) dikali konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar 62,74 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Tahun 2018. Produksi padi diperoleh dari data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2017, kemudian hasil perkalian tersebut dibagi 100 (PermenLH No. 17 Tahun 2009; Badan Pusat Statistik, 2018).

$$SL = \frac{Pi \times Hi}{100}$$

keterangan:

SL	=	Ketersediaan lahan (ha)
Pi	=	Produksi padi (t)
Hi	=	Harga satuan padi atau Konversi Gabah Kering Giling (per kg) (62,74)

Konsumsi beras dengan satuan ton dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan *(demand)* pangan/lahan didapat dari penduduk (jiwa) dikali konsumsi beras (kg/orang/tahun) tahun 2017 sebesar 114,6 yang bersumber dai Badan Pusat Statistik Tahun 2018, kemudian hasil perkalian tersebut dibagi 1000. Data Penduduk didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018. Hal ini mengingat bahwa sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Nomor:

050/4015/Bangda tanggal 16 Agustus 2018 bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah wajib menggunakan data kependudukan yang bersumber dari perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat provinsi. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perencanaan pembangunan daerah terkait dengan ketersediaan pangan, seperti penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui upaya pemanfaatan ruang. Perhitungaan kebutuhan lahan menggunakan rumus sesuai PermenLH No. 17 Tahun 2009 sebagai berikut,

$$DL = \frac{N \times KHLL}{1000}$$

Keterangan:
DL = Total kebutuhan lahan setara beras (ha)
N = Jumlah penduduk (orang)
KHLL = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk atau konsumsi beras (kg/orang/tahun) (114,6)

Dari kedua variabel tersebut, kemudian dilakukan perhitungan daya dukung pangan dengan membandingkan antara ketersediaan pangan/lahan (SL) dan kebutuhan pangan/lahan (DL), yakni

1. Apabila SL > DL dengan nilai diatas 2, maka daya dukung pangan/lahan dinyatakan surplus besar.
2. Apabila SL > DL dengan nilai antara 1-2, maka daya dukung pangan/lahan dinyatakan surplus.
3. Apabila SL < DL denga nilai kurang dari 1, maka daya dukung pangan/lahan dinyatakan defisit.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah metode kuartil, di mana kuartil adalah batasan yang akan membagi distribusi frekuensi menjadi empat sama besar (Ananda dan Fadhil, 2018). Metode yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan daya dukung pangan/lahan tersebut dari yang surplus besar, surplus dan defisit menjadi surplus besar, surplus, hampir defisit dan defisit dari daya dukung pangan/lahan tersebut yang telah dihitung sebelumnya. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa dengan menggunakan perhitungan sebelumnya akan menunjukan hasil yang berbeda dengan perhitungan dengan metode kuartil ini atau dengan kata lain dari yang sebelumnya hanya 3 kategori/batasan menjadi 4 kategori/batasan. Perhitungan metode kuartil pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan data kuartil baik yang ganjil dan genap (Ananda dan Fadhil, 2018*)*. Apabila data ganjil, maka perhitungannya dari nilai tengah masing-masing kuartil yakni kuartil 1, 2, dan 3. Apabila data genap, maka mencari nilai tengahnya (Q2) dengan membagi nilai minimal ditambah nilai maksimal menjadi dua bagian yang sama, begitupula dengan data yang untuk kuartil bawah (Q1) dan kuartil atas (Q3) (Arikunto, 2013).

q1 = ¼ x n (responden) +1
q2 = ½ x n (responden) +1
q3 = ¾ x n (responden) +1

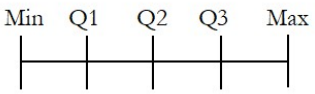

Pembagian batasan/kategori data dukung pangan, meliputi

1. Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal
2. Median≤ x < Kuartil 3
3. Kuartil 1 ≤ x < Median
4. Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1

Hasil dan Pembahasan

Analisis daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan didapatkan data statistik mengenai produksi beras terkait ketersediaan pangan/lahan dan konsumsi beras terkait kebutuhan pangan/lahan. Ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki produksi beras yang paling tinggi sebesar 819.091,40 ton. sedangkan yang paling rendah adalah Kota Prabumulih sebesar 1.644,42 ton (Tabel 1 dan Gambar 2).

Tabel 1. Daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi Padi (ton) (Pi)	Produksi Beras (Ton) (Ketersediaan Pangan/ Lahan) (SL)	Penduduk (Jiwa) (N)	Konsumsi Beras (ton) (Kebutuhan Pangan/ Lahan) (DL)	Daya Dukung Pangan (Produksi Beras/ Konsumsi Beras) (SL/DL) (DD Pangan)	Keterangan
1	Banyuasin	1.305.533,00	819.091,40	803.895,00	92.126,37	8,89	Surplus Besar
2	Empat Lawang	106.952,00	67.101,68	327.053,00	37.480,27	1,79	Surplus
3	Lahat	208.087,00	130.553,78	427.320,00	48.970,87	2,67	Surplus Besar
4	Lubuklinggau	27.089,00	16.995,64	217.119,00	24.881,84	0,68	Defisit
5	Muara Enim	178.978,00	112.290,80	567.450,00	65.029,77	1,73	Surplus
6	Musi Banyuasin	368.516,00	231.206,94	608.125,00	69.691,13	3,32	Surplus Besar
7	Musi Rawas	388.329,00	243.637,61	408.597,00	46.825,22	5,20	Surplus Besar
8	Musi Rawas Utara	34.446,00	21.611,42	188.680,00	21.622,73	1,00	Surplus
9	Ogan Ilir	211.616,00	132.767,88	419.529,00	48.078,02	2,76	Surplus Besar
10	Ogan Komering Ilir	819.206,00	513.969,84	721.571,00	82.692,04	6,22	Surplus Besar
11	Ogan Komering Ulu	56.872,00	35.681,49	357.502,00	40.969,73	0,87	Defisit
12	Ogan Komering Ulu Selatan	197.591,00	123.968,59	410.303,00	47.020,72	2,64	Surplus Besar
13	Ogan Komering Ulu Timur	921.979,00	578.449,62	633.810,00	72.634,63	7,96	Surplus Besar
14	Pagar Alam	48.010,00	30.121,47	139.867,00	16.028,76	1,88	Surplus
15	Palembang	21.661,00	13.590,11	1.560.297,00	178.810,04	0,08	Defisit
16	Penukal Abab Lematang Ilir	45.585,00	28.600,03	170.497,00	19.538,96	1,46	Surplus
17	Prabumulih	2.621,00	1.644,42	190.913,00	21.878,63	0,08	Defisit
	Sumatera Selatan	**4.943.071,00**	**3.101.282,75**	**8.152.528,00**	**934.279,71**	**3,32**	Surplus Besar
	Surplus	**Besar**	**Beras**	**(ton)**		**2.167.003,04**	

e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2020.007.1.8

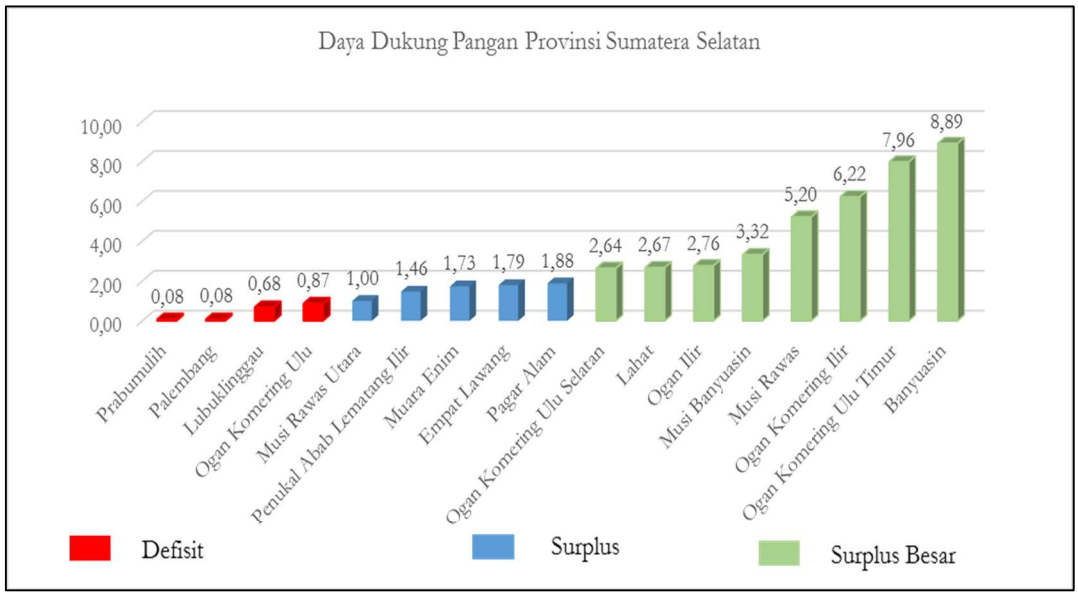

Gambar 2. Daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan

Hal ini dikarenakan produksi beras Kabupaten Banyuasin lebih tinggi dari Kota Prabumulih. Kebutuhan pangan Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa Kota Palembang merupakan daerah dengan konsumsi beras paling tinggi sebesar 1.560.297 ton, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Pagar Alam sebesar 139.867 ton. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Palembag lebih banyak daripada Kota Pagar Alam.

Nilai-nilai tersebut diperlukan untuk mengetahui daya dukung pangan suatu wilayah dalam keadaan surplus besar, surplus dan defisit. Dari hasil perhitungan daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa didominasi oleh surplus besar dengan nilai di atas 2 sebanyak delapan Kabupaten, yakni Banyuasin, OKU Timur, OKU, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat dan OKU Selatan. Keadaan surplus besar menunjukan bahwa ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan. Daya Dukung Pangan yang mengalami surplus dengan nilai berkisar 1-2 sebanyak lima kabupaten/kota, yakni Musi Rawas Utara, PALI, Pagar Alam, Muara Enim, dan Empat Lawang. Keadaan surplus menunjukan bahwa ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan pangan. Daya dukung pangan yang mengalam defisit dengan nilai dibawah 1 sebanyak empat kabupaten/kota, yakni Prabumulih, Palembang, Lubuklinggau, dan OKU. Keadaan defisit menunjukan bahwa ketersediaan pangan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan.

Dilihat secara keseluruhan atau rata-rata bahwa daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan bernilai diatas 2 yakni 3,32 atau mengalami surplus besar sebesar 2.167.003,04 ton, di mana ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3.101.282,75 ton melebihi kebutuhan pangan sebesar 934.279,71 ton sehingga daerah yang mengalami defisit dapat didukung oleh daerah yang mengalami surplus besar dan surplus.

Analisis batasan daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui batasan daya dukung pangan/lahan dari surplus besar, surplus dan defisit menjadi surplus besar, surplus, hampir defisit dan defisit berdasarkan daya dukung pangan/lahan yang telah dihitung sebelumnya. Dari hasil perhitungan ini, diketahui bahwa didominasi oleh batasan daya dukung pangan yang terindikasi masuk ke hampir defisit pangan, yakni terdapat lima kabupaten/kota, meliputi Pagar Alam, Empat Lawang, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara (Tabel 2, Gambar 3 dan 4). Perhitungan sebelumnya, daerah yang sebelumnya surplus terindikasi hampir defisit.

e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2020.007.1.8

Tabel 2. Batasan daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Pangan (DD Pangan)	Kuartil Bawah, Tengah dan Atas (Q1, Q2, Q3)	Ulasan	Batas Skor DD Pangan	Batasan/ Kategori DD Pangan
1	Banyuasin	8,89				
2	Ogan Komering Ulu Timur	7,96		Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal	4,25-8,89	Surplus Besar
3	Ogan Komering Ilir	6,22				
4	Musi Rawas	5,20				
5	Musi Banyuasin	3,32				
6	Ogan Ilir	2,76		Median≤ x < Kuartil 3	1,87-4,27	Surplus
7	Lahat	2,67	Skor Minimal = 0,08 Q1 = 0,94 Q2 = 1,88 Q3 = 4,26 Skor Maksimal = 8,89			
8	Ogan Komering Ulu Selatan	2,64				
9	Pagar Alam	1,88				
10	Empat Lawang	1,79		Kuartil 1 ≤ x < Median	0,93-1,89	Hampir Defisit
11	Muara Enim	1,73				
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1,46				
13	Musi Rawas Utara	1,00				
14	Ogan Komering Ulu	0,87		Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1	0,08-0,95	Defisit
15	Lubuklinggau	0,68				
16	Palembang	0,08				
17	Prabumulih	0,08				
	Sumatera Selatan	**3,32**				**Surplus**

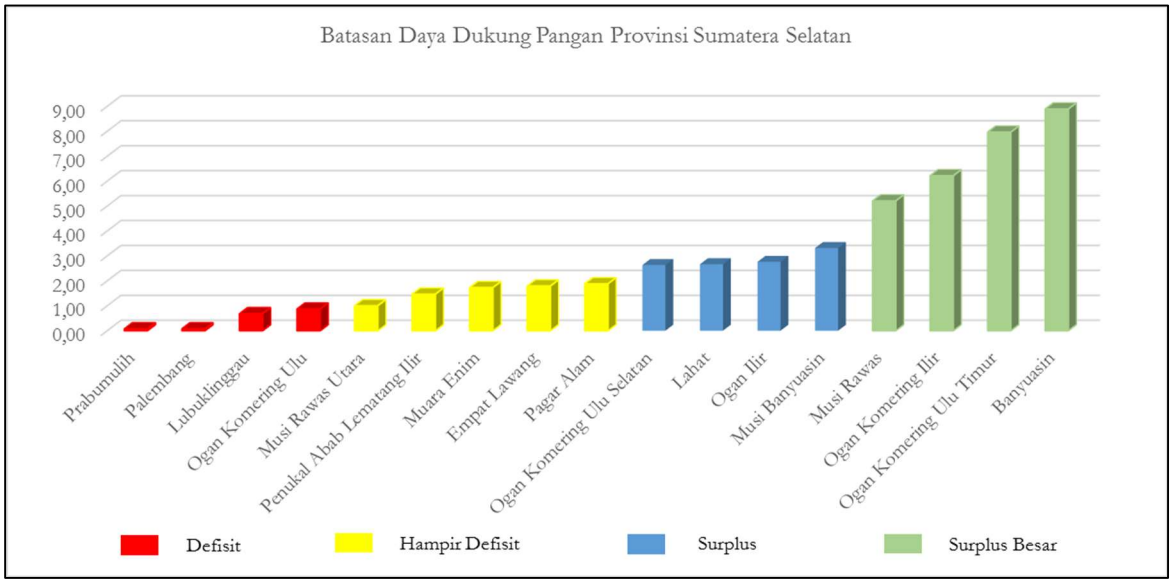

Gambar 3. Grafik batasan daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan

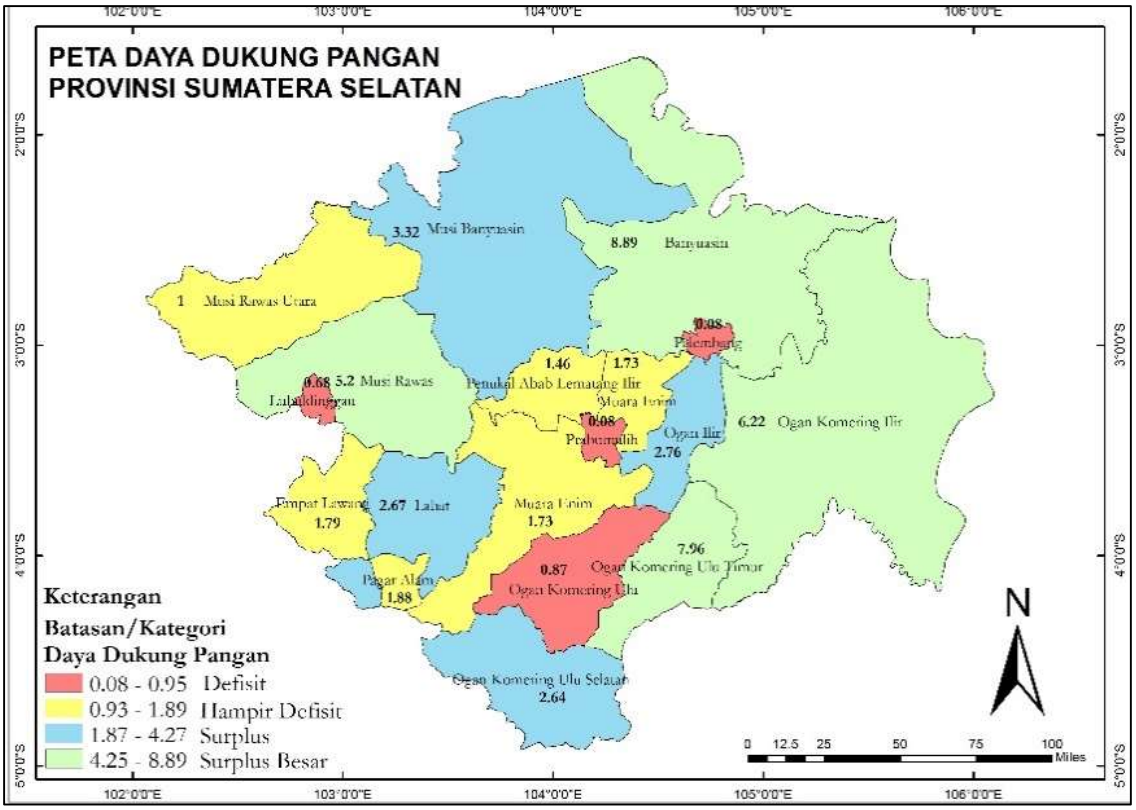

Gambar 4. Peta daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan.

Begitu pula dengan batasan daya dukung pangan lainnya, untuk surplus besar diindikasikan berada di empat kabupaten, yakni Banyuasin, OKU Timur, OKI, dan Musi Rawas, sedangkan surplus diindikasikan berada di empat kabupaten, yakni Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, dan OKU Selatan. Pada perhitungan sebelumnya daerah yang masuk ke surplus besar terdapat delapan kabupaten, sedangkan pada perhitungan batasan ini terindikasi empat kabupaten masuk ke surplus besar dan 4 (empat) kabupaten lainnya masuk ke surplus. Hal yang sama ditunjukan pada batasan yang masuk atau terindikasi defisit dengan perhitungan sebelumnya, di mana terdapat empat kabupaten/kota defisit pangan, yakni OKU, Lubuklinggau, Palembang, dan Prabumulih. Dilihat secara keseluruhan, rata-rata daya dukung pangan Provinsi Sumatera Selatan terindikasi masuk ke surplus, sedangkan pada perhitungan sebelumnya masuk ke surplus besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Selatan mencukupi kebutuhan pangan sehingga daerah yang mengalami defisit dapat didukung oleh daerah yang mengalami surplus besar dan surplus.

Kesimpulan

Dilihat dari hasil temuan studi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung pangan Provnsi Sumatera Selatan secara keseluruhan masuk batasan/kategori surplus dengan nilai sebesar 3,32 atau sebanyak 2.167.003,04 ton beras, namun masih terdapat daerah yang masuk ke hampir defisit dan defisit, akan tetapi adapula yang masuk ke surplus besar.

Daerah yang terindikasi hampir defisit berada pada batas skor 0,93-1,89 sebanyak lima kabupaten/kota, sedangkan yang defisit pada batas skor 0,08-0,95 sebanyak empat kabupaten/kota. daerah yang diindikasikan defisit dan hampir defisit menjadi prioritas utama untuk didukung oleh daerah yang terindikasi surplus besar dan surplus. Dalam

upaya keberlanjutan pangan seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pangan/lahan yang berpengaruh pada ketersediaan pangan/lahan, maka perlu adanya kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan didukung peningkatan layanan sistem irigasi yang bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota agar daya dukung pangan tetap dalam keadaan surplus bahkan surplus besar dalam menjadikan Sumatera Selatan menjadi lumbung pangan nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penerapan perhitungan pada teori daya dukung pangan, di mana kontribusinya terletak pada perhitungan metode kuartil dalam penentuan batasan/kategori daya dukung pangan.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan studi berdasarkan hasil perhitungan data sekunder hanya pada pangan tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya dari hasil forum diskus agar lebih detail dan spesifik, maka perlu adanya studi lanjutan, mengenai 1) kajian daya dukung lahan (mencakup komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dan 2) kajian strategi/skenario daya dukung pangan.

Daftar Pustaka

Aminah, A.N. 2018. Kementan: Lahan Pertanian di Sumsel Belum Diolah Maksimal. Available at: https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/13/pezbqg384-kementan-lahan-pertanian-di-sumsel-belum-diolah-maksimal. Diakses pada tanggal 18 September 2019.

Ananda, R. dan Fadhli, M. 2018. Statsitik Pendidikan: Teori dan Praktik dalam Pendidikan. Medan: CV. Widya Puspita.

Antara. 2019. Mentan: Sumsel Lumbung Pangan Nasional di 2021. Available at: https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/VNxZ0vyk-mentan-sumsel-lumbung-pangan-nasional-di-2021. Diakses pada tanggal 18 September 2019.

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. 2018. Survei Konversi Gabah ke Beras. Jakarta: PT. Citra Mawana Patamaro.

Deliyanto, B. 2014. Manajemen Lahan. Banten: Universitas Terbuka.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. 2017. Tutupan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. 2018. Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Palembang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. 2017. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Sumatera Selatan. Palembang: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Febrinastri, F. 2019. Gubernur Sumsel: Pertanian Jadi Potensi yang Dapat Turunkan Kemiskinan. Available at: https://www.suara.com/bisnis/2019/07/03/080221/gubernur-sumsel-pertanian-jadi-potensi-yang-dapat-turunkan-kemiskinan. Diakses pada tanggal 18 September 2019.

Food and Agriculture Organization. 1996. Rome Declaration on World Food Security. World Food Summit Plan of Action. Rome, Italy: Author. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM.

Kamus Tata Ruang. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 1997.

Karsin, E.S. 2004. Peranan Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan dalam Y. F. Baliwati, A. Khomsan dan CW. Dwiriani (eds), Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/4015/Bangda tanggal 16 Agustus 2018. Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, 2018.

Muta'ali, L. 2012. Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2016. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 04. Sekretaris Daerah. Palembang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2016.

Republik Indonesia. 2007. Undangn-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Negara Lingkugan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Deputi V MENLH Bidang Penataan Lingkungan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1955. Biro Hukum. Jakarta.

Widodo, B., Lupyanto, R., Sulistiono, B., Harjito, D.A. dan Hamidin, J. 2015. Analysis of environmental carrying capacity for the development of sustainable settlement in Yogyakarta Urban Area. Procedia Environmental Sciences 28: 519–527. doi : 10.1016/j.proenv.2015.07.062.

.